

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia**

###### **2.1.1.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP. Indeks pembangunan manusia merupakan komposit yang dihitung dengan rata-rata dari tiga indeks atau indeks yang digunakan untuk mengukur salah satu yang berkaitan dengan kualitas hidup dari hasil pembangunan ekonomi dengan menggambarkan suatu kemampuan manusia untuk memperluas pilihan-pilihan yaitu indeks pendidikan, indeks harapan hidup, dan indeks standar hidup layak (Aamelia dkk, 2020).

Indeks pembangunan manusia adalah salah satu tolak ukur yang digunakan melalui kualitas pembangunan manusia baik dari kondisi fisik manusia (kesehatan) yang dilihat dari angka harapan hidup dan kemampuan daya beli masyarakat maupun dari kondisi non-fisik (pendidikan) yang tercermin dari kualitas pendidikan masyarakat. Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Indeks (HDI)* dibuat oleh *United Nation Development programme (UNDP)* yang disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara selain pendapatan perkapita. Pada dasarnya pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi merupakan proses kebijakan pemerintah dan swasta dalam mengelolah sumber daya yang ada.

IPM juga akan menjadi sebuah cerminan yang lebih kompleks mengenai suatu keberhasilan di negara/wilayah dalam pembangunanya misalnya sekalipun dua wilayah yang terjadi memiliki tingkat pendapatan per orang yang sama tapi memiliki keberhasilan pembangunan yang berbeda. Fakta inilah yang akan merangsang perdebatan tentang apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesenjangan pada tingkat pembangunan suatu wilayah/negara tertentu. Konsep pembangunan manusia dalam pertumbuhan ekonomi didukung oleh beberapa pokok penting atau empat dimensi yaitu (Mahar, 2018; Viana, 2022):

a) Produktivitas

Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktivitasnya dan berpartisipasi penuh untuk mencari penghasilan dan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan manusia.

b) Pemerataan

Dimana keadaan penduduk harus memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk mengakses sumber daya alam ekonomi dan sosial, sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang tersedia.

c) Kestinambungan

Ketersediaan sumber daya ekonomi dan sosial harus dapat diperbaharui agar generasi selanjutnya dapat mempunyai akses yang terhubung dari

berbagai sumber sumber yaitu sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan yang mudah.

d) Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan serta proses pembangunan dan mengambil manfaat dari proses pembangunan karena akan menentukan kemana arah kehidupan mereka, sehingga perlu adanya suatu pemberdayaan penduduk untuk meningkatkan kualitas setiap kegiatan individu dari semua kalangan yang berpartisipasi penuh.

Pembangunan manusia pada hakikatnya yaitu untuk memperluas suatu pilihan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam setiap anggotanya, hal ini bisa mencakup berbagai aspek lainnya yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, politik, budanya, dan aspek lainnya yang menjadikan masyarakat lebih produktif (Amelia, 2020).

#### **2.1.1.2 Komponen Indeks Pembangunan Mansuia (IPM)**

Dalam *Human Development Report (UNESCO, 2007)* bahwa HDI adalah kontruksi pengukuran dengan konsep dasar *right based approach to human development*. Dengan melakukan pengukuran ini, HDI melakukan pengukuran rata-rata capaian disetiap individu di suatu negara yang menyangkut tiga dimensi dasar kualitas pengembangan manusia dengan beberapa asumsi dengan dasar-dasar komponen dalam melakukan perubahan IPM yaitu :

- a. Usia hidup/ketahanan hidup, komponen ini dapat diukur dengan harapan hidup pada saat lahir yang mengacu pada rata-rata banyaknya tahun yang di

tempuh, dimensi umur panjang dan hidup sehat yang dinilai sangat penting di bidang kesehatan.

- b. Pendidikan yang dihitung berdasarkan harapan lama sekolah dan tahun rata-rata lama sekolah memiliki kecakapan dan pendidikan yang penting dalam hidupnya, dapat diukur melalui indikator angka literasi orang dewasa yang memiliki bobot penilaian dua pertiga, serta dikombinasikan dengan angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan bobot nilai satu pertiga dari penghitungan indeks pendidikan.
- c. Daya beli berdasarkan kualitas hidup yang diukur menggunakan PDB riil perkapita yang disesuaikan dengan paritas daya belinya dengan mata uang di setiap negara.

Dari setiap indikator-indikator IPM terdapat nilai maksimum dan minimum untuk menentukan standar yang dibuat oleh UNPD, sehingga dapat memengaruhi nilai IPM yang dapat diukur sehingga terjadi perubahan didalamnya terkait erat dengan perubahan IPM.

### **2.1.1.3 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Banyak variabel sistem pengukuran dan monitoring pembangunan manusia yang mendapat gambaran secara menyeluruh, tetapi indikator yang dibutuhkan bisa terukur dan tepat memberikan suatu gambaran yang pasti. Melihat metode dan variabel yang tepat IPM yang dihasilkan akan cukup relevan. Berbagai pergeseran dalam kebijakan pembangunan perlunya menyesuaikan ukuran hasil pembangunan kebutuhan untuk melihat fenomena atau masalah

dalam standarisasi untuk mengukur pembangunan yang berupaya mengangkat manusia sebagai tujuan utama pembangunan dengan menggunakan kematian bayi, harapan hidup saat lahir, dan melek huruf (Fattah dkk, 2012).

UNPD memperkenalkan metode baru dalam perhitungan indeks pembangunan manusia dengan merubah beberapa indikator yang dianggap kurang relevan. Hal ini didasari dengan alasan yang cukup rasional dengan memiliki alasan utama pada IPM bahwa perhitungannya memiliki dua hal yang mendasar untuk mencapai hasil yang relevan. Tujuannya agar hasil yang dicapai pada nilai IPM rendah tidak ditutupi oleh capaian yang tinggi di dimensi lain, karena konsep yang dibawa dalam pembangunan manusia yaitu pemerataan pembangunan dan sangat anti dengan ketimpangan pembangunan (Eka, 2022).

Indikator angka melek huruf dan gabungan angka partisipasi dasar diubah dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, karena sudah tidak relevan untuk mengukur pendidikan secara utuh, dengan menggunakan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat diperoleh gambaran yang relevan pada perubahan dan pendidikan yang terjadi, dilihat dari banyak negara yang capaiannya sudah sangat tinggi beda dengan indikator dalam dimensi standar hidup layak PNB riil perkapita.

Untuk menghitung nilai IPM menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3} (\text{Indeks } X_1) + (\text{Indeks } X_2) + (\text{Indeks } X_3) \dots \dots \dots (2.1)$$

### Keterangan

IPM : Indeks pembangunan manusia

Indeks  $X_1$  : Indeks kesehatan

Indeks  $X_2$  : Indeks pendidikan

Indeks  $X_3$  : Indeks pendapatan perkapita

Untuk melihat nilai perkembangan IPM pada periode tertentu dengan periode sebelumnya yaitu dengan menggunakan ukuran pertumbuhan IPM maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{PERTUMBUHAN IPM} = \frac{\text{IPM}_t - \text{IPM}_{t-1}}{\text{IPM}_{t-1}} \times 100\% \dots \dots \dots (2.1)$$

### Keterangan :

$\text{IPM}_t$  : IPM pada tahun t.

$\text{IPM}_{t-1}$  : IPM tertentu pada tahun sebelumnya.

Adapun formula yang digunakan dalam menghitung indeks dari berbagai komponen tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Indeks Kesehatan

$$I_{\text{Kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}} \dots \dots \dots (2.1)$$

Keterangan: AHH = Angka harapan hidup saat lahir

## 2. Indeks Pendidikan

Dalam indeks Pendidikan ada dua komponen yakni rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS).

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \dots\dots\dots(2.1)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \dots\dots\dots(2.1)$$

Dari kedua komponen tersebut, untuk menyusun indeks pendidikan keduanya diberi bobot yang sama. Jadi dalam menghitung indeks pendidikan menjadi:

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \dots\dots\dots(2.1)$$

Keterangan: HLS = Harapan lama sekolah

RLS = Rata-rata lama sekolah

## 3. Indeks Pengeluaran

$$I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})} \dots\dots\dots(2.1)$$

Dalam setiap komponen secara terpisah dihitung indeksnya terlebih dahulu sehingga mendapat nilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik) yang dapat memudahkan menganalisis biasanya indeks tersebut dilakukan 100. Untuk menghitung masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum, yang diperjelas sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Dari Setiap Komponen**

<b>KOMPONEN</b>	<b>MINIMUM</b>	<b>MAKSIMUM</b>	<b>KETERANGAN</b>
Angka Harapan Hidup (tahun)	20	85	Standar UNPD
Harapan Lama Sekolah (tahun)	0	18	Standar UNPD
Rata-Rata Lama sekolah (tahun)	0	15	Standar UNPD
Daya Beli (rupiah)	1.007.436	25.572.352	Menggunakan PNB riil perkapita yang telah disesuaikan

*Sumber: Badan Pusat Statistik ( diolah)*

Rumus yang sering digunakan untuk menghitung indeks pembangunan manusia sebagai rata-rata geometrik dari setiap nilai perhitungan maka akan dihasilkan angka dalam berupa skor berkisar antara 0-100. UNDP membagi tingkatan pembangunan manusia dalam empat golongan yang dilihat dari tabel tersebut:

**Tabel 2.2 Peringkat Kinerja Pembangunan**

<b>NO</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b>
1	Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$
2	Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
3	Sedang	$60 \leq IPM < 70$
4	Rendah	$IPM < 60$

*Sumber: Badan Pusat Statistik, (diolah)*

#### **2.1.1.4 Tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

- a. Untuk mengukur sebuah dimensi dalam pembangunan manusia yang berupaya dalam membangun kualitas hidup pembangunan manusia.
- b. Untuk memberikan asumsi terhadap peringkat pembangunan yang berlangsung kesuatu daerah/negara yang dapat menjadi tolak ukur

- c. untuk menemukan strategi dalam mencapai kualitas pembangunan di suatu wilayah di satu sama lain.
- d. Untuk membentuk sebuah indeks yang komposit.
- e. Untuk membangun satu nilai yang mengukur aspek sosial dan ekonomi.

#### **2.1.1.5 Elastisitas**

Menurut Pranomo Hariadi dan Lilis Siti Badriah (2008), elastisitas di bagi menjadi 2 komponen, yaitu:

##### **1. Elastisitas Permintaan**

Elastisitas permintaan adalah suatu alat ukur kuantitatif yang menunjukkan besarnya pengaruh perubahan harga terhadap suatu perubahan permintaan. Elastisitas permintaan dibagi menjadi 3 konsep, yaitu:

##### **a. Elastisitas permintaan harga**

Elastisitas permintaan harga merupakan tingkat permintaan konsumen atau barang yang dibandingkan dengan perubahan tingkat harga barang.

##### **b. Elastisitas permintaan silang**

Elastisitas silang dapat digunakan untuk mengukur besarnya respon jumlah permintaan silang antara dua jenis barang yang diperlukan untuk melihat tingkat hubungan antara keduanya, baik hubungan yang bersifat saling melengkapi (komplementer) atau hubungan saling mengganti (substitusi).

## 2. Elastisitas penawaran

Elastisitas penawaran merupakan suatu alat ukur kuantitatif yang menunjukkan besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan penawaran.

### 2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

#### 2.1.2.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di setiap tahun di berbagai sektor dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui berbagai macam program (Musriyati, 2022).

Pengeluaran pemerintah adalah suatu kebijakan fiskal yaitu tindakan pemerintah yang mengatur jalannya perekonomian dengan menentukan besarnya suatu penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam setiap tahun, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pengeluaran pemerintah menyangkup seluruh pembiayaan dalam pengeluaran di setiap kegiatan-kegiatannya yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Teori Keynes menyatakan bahwa untuk menjamin kebutuhan yang stabil perlu menerapkan kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah), kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan uang beredar), dan pengawasan langsung di dalam pemerintah. Kebijakan fiskal pemerintah dapat memengaruhi kesempatan kerja yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya

investasi nasional dan dapat mempengaruhi distribusi pendapatan nasional. Ada salah satu di daerah Lampung yaitu Prengsewu yang pengeluaran pemerintahnya dimaksimalkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pengeluaran pemerintah yang terus meningkat pada setiap tahunnya.

### **2.1.2.2 Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan**

Pendidikan adalah suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, baik pendidikan formal maupun informal. Produktifitas di suatu negara akan meningkat apabila pemerintah dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakatnya. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dapat memberikan kontribusi terhadap indeks pembangunan manusia yaitu modal manusia, modal tersebut adalah hasil investasi yang diberikan pemerintah untuk pendidikan yang baik sehingga dapat meningkatkan pembangunan manusia yang baik juga. Pengeluaran pada sektor pembangunan mengalokasikan penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang diberikan kepada penduduk Indonesia secara merata (Todaro, 2006).

Anggaran dalam pengeluaran yang disediakan sebesar 20% dari APBN yang merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan sebagai mana tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Secara umum anggaran pemerintah dapat diartikan sebagai rencana keuangan

yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan dalam periode dimasa yang akan datang. Adanya pendidikan masyarakat yang baik akan memperoleh ilmu pengetahuan, percakapan, dan juga keterampilan. Hal tersebut adalah salah satu faktor dasar yang dibutuhkan oleh para pendidik untuk bersaing dengan negara maju (Prasetio, 2019).

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan telah diakui bahwa pembanguna sumber daya manusia, pengeluaran pemerintah pendidikan di bidang pendidikan digunakan untuk melihat pencapaian terhadap dimensi IPM dan pengetahuan. Peningkatan pendidikan melalui pengeluaran pemerintah di suatu negara sangat penting bagi pembangunan yang diakui bahwa pembangunan sumber daya manusia akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku produktif terhadap orang-orang yang dapat mengakumulasikan modal, mengeksploitasi sumber daya yang ada, dan menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan politik terhadap pembangunan sosial (Susanti, 2020).

Adapun indikator dalam pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yaitu alokasi dana APBD yang dikeluarkan pemerintah sektor pendidikan (indeks pendidikan), antara lain :

1. Pembangunan sarana dan prasarana atau gedung sekolah dengan anggaran yang ditetapkan dalam anggaran belanja yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur sekolah dan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan masyarakat.

2. Bantuan pendidikan untuk siswa atau disebut dengan beasiswa dan lembaga pendidikan serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ketika masyarakat mendapat BOS yaitu orang yang mengenyam pendidikan minimal 12 tahun. Suksesnya program wajar 12 tahun dapat meningkatkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung yang merupakan komponen pembentuk IPM dalam dimensi pengetahuan.
3. Peningkatan pendidikan vokasi bidang industri, penelitian, dan pengembangan pendidikan. Hal ini mengenai kebijakan Presiden RI Jokowi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi), kementerian kebudayaan, riset, teknologi, akan terus mendorong tercapainya visi nasional untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, melalui vokasi di bidang industri kreatif.

Kebutuhan sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, hal tersebut untuk meningkatkan pembiayaan publik dengan sumber-sumber penerimaan di daerahnya sendiri, sehingga dengan otonomi daerah pemerintah akan semakin mampu memenuhi kebutuhan pembangunannya. Indikator perhitungan IPM yang memasukan indeks pendidikan ada dua komponen prestasi yaitu, indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah. Dalam indeks melek huruf dihitung berdasarkan perubahan angka melek huruf, sedangkan indeks rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan angka rata-rata lama sekolah.

### **2.1.2.3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan**

Kesehatan merupakan kebutuhan mutlak bagi manusia, karena semakin baiknya kesehatan maka akan meningkatkan produktivitas yang tinggi. Kegiatan ekonomi di suatu negara akan berjalan apabila ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Kesehatan juga adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sumber daya manusia, hal tersebut sangat penting karena pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan anggaran pengeluaran pemerintah yang dapat menyediakan layanan publik berupa sarana dan prasarana kesehatan (Prasetio, 2019).

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan diatur dalam Undang-Undang No 36 tahun 2009 yang mengatur mengenai anggaran kesehatan. Dalam UU ini menyatakan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN diluar gaji, sedangkan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah di setiap Provinsi Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBN diluar gaji. Anggaran tersebut dapat menjamin hak dasar rakyat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, merata, bermutu serta terjangkau bagi kalangan masyarakat. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan digunakan untuk melihat pencapaiannya terhadap dimensi IPM yang pertama yaitu, hidup sehat dan umur panjang (Herianingrum, 2015).

Adapun indikator pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yaitu alokasi dana APBD yang dikeluarkan oleh bidang kesehatan, yaitu:

- a. Peningkatan dan pembangunan/revitalisasi fasilitas kesehatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan dengan program pembangunan rumah sakit dan revitalisasi puskesmas dan posyandu. Program tersebut mendukung adanya upaya preventif untuk terus menjaga kesehatan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesehatan dan mempertinggi usia harapan hidup masyarakat Lampung.

- b. Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Program Germas juga dapat mendorong naiknya usia harapan hidup masyarakatnya. Anggaran belanja kesehatan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program penyehatan lingkungan dalam usia harapan hidup masyarakat.

- c. Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Bantuan Iuran Kesehatan Masyarakat.

Anggaran dalam kesehatan yang digunakan untuk membiayai jaminan kesehatan untuk masyarakat yakni peningkatan layanan Jaminan Kesehatan Negara (JKN) seperti bantuan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial-Kesehatan (BPJS), pembangunan rumah sakit, dan pendorong hidup sehat, dalam mengakses kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Negara (JKN) akan terpenuhi subsidi pemerintah yang mampu membuat individunya hidup layak dan umur panjang pada dimensi pertama IPM. Peserta BPJS kesehatan dalam pembiayaan Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) bersumber dari APBN dan APBD per Kabupaten Kota Provinsi Lampung meningkat. Di tahun 2019 peserta PBI APBN

terdapat 96,055 jiwa, sedangkan peserta APBD mencapai 37,887 peserta. Artinya lebih dari 133 juta jiwa BPJS kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total kepesertaan BPJS kesehatan mencapai 222,278,708 yang di tanggung oleh negara. Sementara di tahun 2022 jumlah tersebut meningkat menjadi sebanyak 864,673 jiwa (82%) dalam anggaran PBI APBN, dan peserta APBD sebanyak 98,000 jiwa.

#### **2.1.2.4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur**

Infrastruktur merupakan pola yang bergerak disuatu perekonomian manusia. Semakin baik infrastruktur di suatu negara maka dapat mempermudah kegiatan-kegiatan dalam pembangunan ekonomi. Infrastruktur dapat memeperluas akses pasar dan mengurangi biaya transaksi dengan membaiknya infrastruktur dapat pula memperlancar mobilitas ekonomi antar daerah yang akan menarik minat para investor untuk berinvestasi, sehingga pada akhirnya hal tersebut akan meningkatkan pembangunan yang kemudian dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat terhadap dimensi IPM.

Infrastruktur merupakan fasilitas-fasilitas fisik untuk mendukung pembangunan ekonomi di suatu negara dapat terwujud. Hal tersebut dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi pemerintah dalam pembangunan ekonomi yaitu penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, perumahan, dan pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan ekonomi dan sosial. Infrastruktur mempunyai input penting bagi kegiatan produksi yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan berbagai cara baik secara langsung

maupun tidak langsung. Pembangunan ekonomi dengan keberadaan infrastruktur tidak hanya merupakan kegiatan produksi yang menciptakan kesempatan kerja, namun keberadaan infrastruktur juga mempengaruhi efisiensi dan kelancaran di dalam kegiatan ekonomi lainnya. Infrastruktur juga dapat memperlihatkan seberapa besar pemerataan pembangunan yang terjadi di suatu negara (Sinaga, 2020).

Ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Alasan yang pertama adalah dengan ketersediaan infrastruktur yang baru merupakan mesin utama dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangatlah penting untuk aktivitas perdagangan dan investasi. Alasan ketiga yaitu perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga sangat penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar Negara (Reguna, 2020).

### **2.1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan penulis sebagai landasan berfikir penulis, untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, penelitian terdahulu berhasil dipilih untuk dikedepankan yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian, Tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Enika Tje Yustim Dima dan Beatrik Seran, 2020, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Kupang	Indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan	Pertumbuhan ekonomi	Hubungan dan pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.	Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.5, No.2, Juni 2020
2.	Setyawan, (2020), pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2010-2019	Indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan		Hubungan dan pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM.	E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3.	Handayani dan Kadir (2015), Analisis pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau.	IPM, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan	Sektor pendidikan	Pengeluaran sektor pendidikan di provinsi Riau berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM, dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan	Jurnal Pembangunan Ekonomi, Vol. 13, No. 1, Oktober 2015
4.	Andi Maujung Tjodi, T.O Rotinsulu dan George M.V	Indeks pembangunan manusia, pengeluaran	Pertumbuhan ekonomi, belanja modal.	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan	Jurnal Pembangunan Ekonomi dan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kawung, 2018, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara	pemerintah sektor pendidikan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan		dan belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.	Keuangan Daerah, Vol.19, No.4, 2018
5	Z.Maryozi, B.Isyandi dan Ando Fahda, 2022, Pengaruh Pengeluaran bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi riau	Indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan	Pengeluaran pemerintah bidang Infrastruktur jalan	Hubungan dan pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM	Jurnal Niara, Vol.15, No.1, Mei 2022
6.	Mariua K.Tupamahu, Maria Sangadji dan Ali J.Rumbouw, 2022, Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan di provinsi maluku	Indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, infrastruktur	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan	Hubungan dan pengaruh pengeluaran pemerintah pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM, Dan di sektor kesehatan dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM	Jurnal Ekonomi, Vol.1, No.1, 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Meylina Atri, S.P.D, Sri Indah Niken Sari, S.E, M.Si, Dr. Hsrya Kuncara W. S.E, M.Si, 2013 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia	Indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan		Hubungan dan pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.	Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, Maret 2013
8.	Intan Safitri, 2016, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provindi Aceh	Indeks pembanguan manusia, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan infrastruktur	Hubungan dan pengaruh pengeluaran pemerintah pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan. Di sektor infrastruktur berpengaruh postif namun tidak signifikan terhadap IPM.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, Vol.1, No.1, Agustus 2016.
9.	Dwi Hidayati Niniek Imaningsih,	Indeks pembanguan manusia, pengeluaran	Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan,	Hubungan dan pengaruh pengeluaran pemerintah sektor	Jurnal Ekonomi, Manajemen dan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2022, Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi,dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2010-2021	pemerintah sektor pendidikan	pertumbuha n ekonomi, kemiskinan	pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan dan tidak berpengaruh positif, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif, kemiskinan berpengaru positif	Akuntansi, Vol. 24, No. 4, 2022
<b>10.</b>	Fitrika dan Ella, 2022, Analisis Pengaruh Pengeuaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2020	Indeks pembanguna n manusia, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan	Hubungan dan pengaruuh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM di Indonesia, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.	E-Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, 2022
<b>11.</b>	Feby Amelia Nurtati dan Syofria Meidona, 2020, Pengaruh Pengeuaran Pemerintah	Indeks pembanguna n manusia, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan	Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan	Hubungan dan pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM	Jurnal Point Equilibrium Manajemen & Akuntantis, Vol. 2, No.1, Agustus 2020.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan di Kota Pariaman tahun 2013-2018			di kota pariaman, dan pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM.	
12.	Muhammad Alifuddin Aguspriyanto, 2022, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Pulau Jawa.	Indeks pembangunan manusia, Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan.	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, produk domestik regional bruto	Hubungan dan pengaruh produk domestik regional bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.	Jurnal Ekonomi Mahasiswa (JEKMA), Vol.3, No.1, Janurai 2022
13.	Endah Susanti, 2020, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan	Pengeluaran sektor pendidikan, pengeluaran sektor infrastruktur	Hubungan dan pengaruh pengeluaran sektor pendidikan dan infrastruktur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, Pengaruh pengeluaran	ECO-BUILD JOURNAL, Vol.4, No.2, Oktober 2020.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	di Provinsi Kalimantan Timur periode 2010-2019.			pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.	
<b>14.</b>	Ani Interdiana Candra Sari, Zakiah Fithah A'ini dan Martinus Tukiran, 2022, Pengaruh Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2015-2019	Indeks pembangunan manusia, pengaruh anggaran pendidikan, pengaruh anggaran kesehatan		Hubungan dan pengaruh anggaran pendidikan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.	Journal of Applied Business dan Economic (JABE), Vol.9, No 2, Desember 2022.
<b>15.</b>	Rahimah dan Ika Chandriyanti, 2022, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Banjarmasin tahun 2010-2019	Indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan	Pengeluaran pemerintah bidag kesehatan, tingkat kemiskinan, pendapatan perkapita	Hubungan dan pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan tingkat kemiskinan secara persial tidak berpengaruh signifikan.	Jurnal Ilmu Ekonmi dan Pembangunan, Vol.5, No.2, 2022

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan-tujuan penelitian, hubungan variabel dinyatakan dalam kerangka berfikir. Kerangka berfikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terkait yaitu dalam pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi. Dalam penelitian ini hubungan model variabel yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan ( $X_1$ ), pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan ( $X_2$ ), pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur ( $X_3$ ), indeks pembangunan manusia ( $Y$ ).

### **2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Hal tersebut merupakan konsep pendidikan disebut investasi yang berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan syarat kunci dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan kesetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas yang akan menjadi tujuan penting dari kebijakan pembangunan. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan mengalokasikan sebuah penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata.

Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan. Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan, dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi sektor pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Prasetio, 2019).

Sumber daya manusia bagi suatu bangsa merupakan salah satu faktor yang menentukan pembangunan ekonomi dan sosial bangsa tersebut. Isu mengenai sumber daya manusia (*human capital*) sebagai input pembangunan ekonomi dalam pemerintah yang menetapkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Pendidikan formal merupakan kebutuhan mutlak bagi masyarakat yang wajib disediakan oleh negara, namun tidak hanya menerima pengetahuan, norma-norma, nilai luhur, dan cita-cita pun bisa sekaligus tertanam ikut andil dalam pembangunan bangsa, sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia di era perkembangan zaman yang dimana kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat kemajuan masyarakat (Mahar, 2018).

Pengeluaran pemerintah diwujudkan melalui kebijakan dan program pemerintah, sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memberikan kontribusi terhadap indeks pembangunan manusia yaitu modal manusia. Modal di sini merupakan hasil dari investasi yang diberikan pemerintah untuk pendidikan yang dimana modal pendidikan yang baik dapat meningkatkan pembangunan manusia yang baik juga, sehingga pengeluaran pemerintah sektor pendidikan ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia ( $Y$ ) (Nafik dkk, 2019; Merang dkk, 2019; Todaro, 2006).

### **2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Kesehatan adalah salah satu tujuan pembangunan yang mendasar. Kesehatan sangat penting yang artinya bagi kesejahteraan dan fundamental dalam kaitannya akan lebih luas dengan gagasan yang mengenai peningkatan kapabilitas manusia sehingga hal tersebut adalah makna pembangunan yang sesungguhnya. Manusia tidak akan dapat beraktifitas dengan baik jika mengalami gangguan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, tidak hanya untuk usia dewasa tapi juga untuk usia anak-anak. Keluarga yang sehat, pendidikan anak akan cenderung lebih baik dan tidak akan terpetus jika dibandingkan dengan keluarga yang tidak sehat, sedangkan pada tingkat makro, pendidikan dengan kesehatan yang baik merupakan salah satu input yang penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dalam anggaran kesehatan dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan. Hal tersebut merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat yang sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, melihat mutu manusia dari sisi kesehatan yang dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas manusia.

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memberikan kontribusi terhadap indeks pembangunan manusia yaitu modal manusia, modal disini merupakan hasil dari investasi yang diberikan pemerintah untuk pendidikan yang dimana modal pendidikan yang baik akan meningkatkan pembangunan manusia yang baik, sehingga pengeluaran pemerintah sektor kesehatan ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia ( $Y$ ) (Todaro, 2006; Endah dkk, 2020).

### **2.2.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Keberhasilan pembangunan manusia dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat yang dapat teratasi seperti kemiskinan dan pengangguran serta ketiadaan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan, namun keberhasilan pembangunan manusia juga diukur di dalam berbagai ukuran yang sudah dibuat di semua wilayah atau negara. Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem

penyediaan air bersih, dan pembangunan yang dibiayain oleh pemerintah lainnya merupakan *social overhead capital* yang berkaitan dengan tingkat perkembangan wilayah dengan dicirikan oleh pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang sangat kuat (Rosyd, 2019).

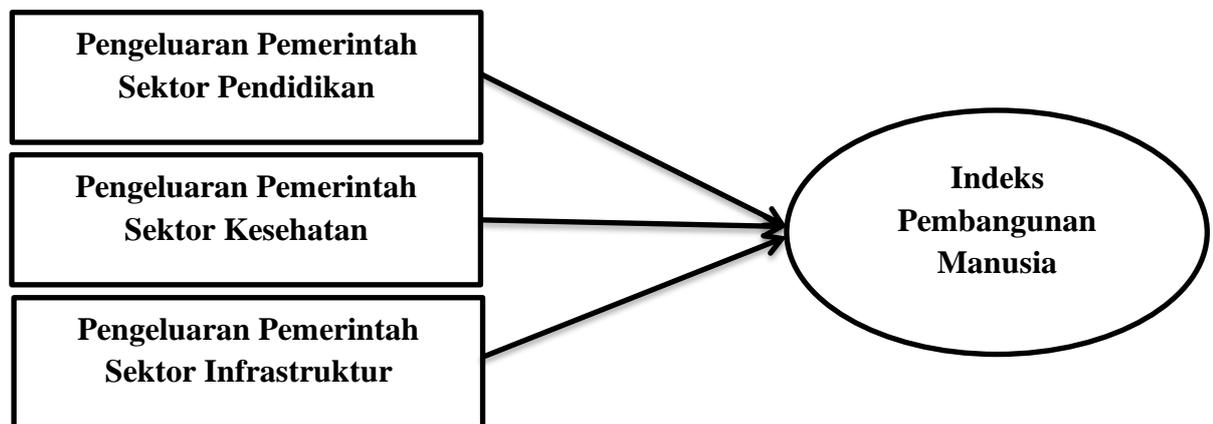
Infrastruktur berperan sebagai koneksi ataupun input produksi, dengan adanya perbaikan pelayanan, kualitas, dan penambahan fasilitas membuat mobilitas dan kinerja masyarakat menjadi meningkat, serta infrastruktur yang baik dapat membuka peluang para investor untuk berinvestasi sehingga dapat meningkatkan pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur dapat dilihat perkembangannya dengan pembangunan ekonomi yang mempunyai hubungan saling ketergantungan satu sama lain. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pada dasarnya akan meningkatkan mobilitas penduduk, pengangkutan barang-barang, serta perbaikan kualitas dari jasa jasa pengangkutan tersebut (Rosyd, 2019).

Infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintah dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan ekonomi dan sosial yang dapat mempengaruhi efisiensi dan kelancaran dalam peningkatan perbaikan pembangunan ekonomi.

Adanya perbaikan pelayanan, kualitas, dan penambahan fasilitas membuat mobilitas dan kinerja masyarakat meningkat, sehingga infrastruktur yang baik akan membawa peluang untuk berinvestasi untuk meningkatkan pembangunan

manusia. Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur dapat terlihat perkembangannya dari pengembangan ekonomi yang mempunyai hubungan saling ketergantungan satu sama lain, sehingga pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur (X3) berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y) (Tupamahu dkk, 2022).

Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.3 Hipotesis**

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung tahun 2010-2021.

2. Diduga pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara bersama-sama berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung tahun 2010-2021.